

ANALISIS *BREAK EVENT POINT* DI SMK NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013

SRI HARYONO

Magister Akuntansi FEB Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

The objective of this research is to calculate break event point of the real education cost in Vocational High School 1 of Karanganyar in 2012/2013. So as be able to know the cost of education will be certified by each student in Vocational High School 1 of Karanganyar. The sample or research object is Vocational High School 1 of Karanganyar. This research is a study case research by employing descriptive quantitative analysis break event point calculation method and operational education cost per month for each student. The calculation is done based on cash basis. The break event calculation for the factual condition of Vocational High School 1 of Karanganyar in 2012/2013 obtain the result: (1) break event point in rupiah currency in the amount of Rp 522.489,12; (2) break event point in a unit total 1, 608 students. The calculation of education cost by a traditional approach in Vocational High School 1 of Karanganyar in 2012/2013 gain the result: (1) The total of education cost per year is Rp 9.929.714.726,80; (2) The education cost per year for each student is Rp 6.852.804,19; and (3) The education cost per month for each student is Rp 571.067,10. The factual condition from the education cost in Vocational High School 1 of Karanganyar shows pattern with a traditional approach. The education cost is adopted to each student proved to be very low compared to the actual cost charged to the students. The government fund support still dominate education funding in Vocational High School 1 of Karanganyar.

Keywords: *education cost, break event point, unit cost*

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk menghitung *break event point* biaya pendidikan yang sesungguhnya terjadi pada SMK Negeri 1 Karanganyar pada tahun pelajaran 2012/2013. Sehingga akan dapat diketahui biaya

pendidikan yang akan menjadi tanggungan per siswa di SMK Negeri 1 Karanganyar.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dicapai. Menurut Riant Nugroho (2008: 2) “Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan tujuan antara, untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut yaitu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera dan mampu bersaing secara global”. Bangsa yang sejahtera adalah dasar menjadi bangsa yang makmur. Hal ini yang menjadi cita-cita dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan Negara Indonesia yaitu menjadi bangsa yang cerdas karena negara ini kaya akan sumber daya alam sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang cerdas. Mencerdaskan bangsa tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya proses pendidikan.

Menurut Undang Undang Sisdiknas, 2003 pasal 1 ayat 1, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan untuk membangun manusia seutuhnya baik fisik maupun psikis manusia tersebut, sehingga pendidikan menjadi kunci untuk mencapai tujuan Negara yang berkenaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Biaya untuk menjalankan proses pendidikan mempunyai peranan yang penting.

Supriyadi (2001) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah serta terlaksananya kegiatan sekolah (intra dan ekstrakurikuler) dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan bermutu. Hal ini sejalan dengan Fattah (1998: 136) yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam menyediakan komponen-komponen input pendidikan, karena pendidikan adalah suatu proses, dengan input yang baik akan menghasilkan proses belajar yang baik dan akhirnya membuat hasil belajar yang maksimal. Selaras dengan pernyataan tersebut suatu proses pendidikan membutuhkan biaya yang banyak untuk memperlancar proses kegiatan belajar siswa.

Pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan yang besar dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2008

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41/2008 tentang APBN untuk membantu pelaksanaan pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Jumlah anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2009 sebesar Rp 207.413.531.763.000,00 dari alokasi anggaran belanja Negara sejumlah Rp 1.037.067.338.120.000,00. (www.anggaran.depkeu.go.id). Penetapan anggaran pendidikan pada tahun 2009 berarti sudah mencapai 20% dari total anggaran negara.

Anggaran pendidikan dari pemerintah masih membutuhkan tambahan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh siswa. Biaya pendidikan yang mahal pada sekolah formal mengakibatkan banyak terdapat anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Biaya pendidikan yang mahal ini terjadi pada sekolah menengah dengan asumsi Sekolah Dasar telah ditetapkan menjadi sekolah gratis. Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan SMP, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan. Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa SM mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Pada tahun 2013 pemerintah mencanangkan program PMU (Pendidikan Menengah Kejuruan). PMU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Tujuan PMU diwujudkan dalam program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2013 dianggarkan 4, 68 triliun rupiah untuk SMA dan SMK yang berstatus Negeri maupun Swasta. Siswa SMK menerima Bantuan Operasional Sekolah SMK sebesar Rp 500.000/siswa/semester dan R-BOS Rp 60.000,00/siswa/ semester. Selain itu masih banyak terdapat berbagai macam bantuan pendidikan untuk memperlancar proses pendidikan. Hal ini yang mendasari pemikiran penulis untuk mengetahui biaya Pendidikan yang sebenarnya terjadi.

Menurut pengamatan penulis di Kabupaten Karanganyar masih terdapat sekolah yang melakukan pemungutan biaya pendidikan yang besar berdasarkan jumlah siswa per sekolah dikalikan satuan biaya BOS SMK. Satuan biaya (*unit cost*) program R-BOS SMK sebesar Rp 60.000/siswa/tahun dan BOS SMK sebesar Rp 500.000/siswa/semester, sehingga total anggaran program R-BOS dan BOS SMK tahun anggaran 2013 sebesar Rp2.311.449.780.000,00 (dua triliun tiga ratus sebelas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pembiayaan sekolah favorit membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan sekolah yang belum favorit. *Apalagi* sekolah eks-RSBI yang selama ini disediakan dana yang besar oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kebijakan penghapusan RSBI menjadi pukulan yang sangat berarti bagi sekolah eks-RSBI, sehingga harus menyesuaikan anggaran dengan pengeluaran biaya pendidikan dan berusaha berbenah dengan keadaan keuangan yang berbeda.

SMK Negeri I Karanganyar merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan terbaik di Kabupaten Karanganyar. Jumlah siswa di sekolah ini berjumlah 1439 siswa. Berdasarkan data rincian pembayaran BOP dan kegiatan siswa per bulan menunjukkan besarnya pungutan yang relatif tinggi. Sekolah ini terdiri dari enam kompetensi keahlian, di setiap kompetensi keahlian memungut biaya pendidikan yang berbeda, besarnya BOP yang dibayar oleh siswa kelas program keahlian bisnis manajemen kelas X Rp 185.000,00, kelas XI dan XII Rp 165.000,00. Program keahlian tata busana dan multimedia kelas X Rp 205.000,00 kelas XI dan XII Rp 180.000,00. Program keahlian usaha perjalanan wisata kelas X Rp 195.000,00, kelas XI dan XII Rp 172.000,00. Data tersebut menunjukkan biaya pendidikan pada kisaran rupiah yang relatif tinggi untuk kalangan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang notabene masih pada ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terbukti dengan banyaknya tunggakan pembayaran BOP dan biaya pendidikan lainnya setiap akhir semester, sehingga siswa harus mendatangkan orang tua untuk mendapatkan nomor ujian semesteran. Kejadian ini juga terulang pada saat akhir kelulusan siswa, sehingga ijazah harus ditahan sementara disekolah selama proses pembayaran biaya sekolah belum lunas. Keadaan ini merupakan fenomena biaya pendidikan yang terlalu tinggi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah di SMK Negeri I Karanganyar. Namun beberapa peneliti telah melakukan studi tentang *unit cost* pendidikan di antaranya, Ibnu Prakoso (2010) Analisis Biaya Pendidikan Dasar, studi kasus di Kabupaten Sragen. Penelitian ini menghitung biaya pendidikan di SMP Negeri Kabupaten Sragen dengan perhitungan faktual dan dengan pendekatan ABC berdasarkan *cash basis*. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada tingkat pendidikan SMK Negeri I Karanganyar dengan perhitungan tradisional untuk mendapatkan nilai *break event point* dan *unit cost*. Penelitian juga dilakukan oleh Setyo Budi Takarina(2012), Satuan Biaya Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian pada Universitas Negeri Yogyakarta ini menghitung *unit cost* mahasiswa S1 UNY. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada tingkat Pendidikan dan penghitungan *break event point*.

SMK Negeri I Karanganyar belum melakukan penghitungan *break event point* dalam menentukan biaya pendidikan. Sehingga belum dapat diketahui beban biaya pendidikan per siswa setiap bulan secara tepat. Keadaan ini menyebabkan belum dapat diketahui biaya pendidikan yang sesungguhnya harus dibebankan kepada siswa, sehingga keputusan yang diambil dalam menentukan biaya pendidikan masih belum tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode analisis kuantitatif deskriptif. Keadaan yang diamati yang menyangkut biaya pendidikan yang berkaitan dengan *break event point* pada SMK Negeri I Karanganyar. Analisis kuantitatif deskriptif dilakukan untuk memaparkan perhitungan nominal angka biaya pendidikan pada posisi *break event point* sehingga dapat diketahui biaya per siswa per bulan. Perhitungan *break event point* biaya pendidikan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran diperbandingkan dengan seluruh pendapatan sehingga akan diperoleh kondisi *break event point*. Sedangkan biaya pendidikan per siswa per bulan diperoleh dengan membagi kondisi *break event point* dibagi dengan jumlah siswa di SMK Negeri I Karanganyar.

Sampel dari penelitian ini adalah satuan pendidikan SMK Negeri I Karanganyar, Pemilihan sampel penelitian di SMK Negeri I Karanganyar dengan pertimbangan bahwa permasalahan tingginya biaya pendidikan di SMK Negeri I Karanganyar masih menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dari masyarakat tersebut. Pertimbangan yang kedua yaitu belum pernah ada penelitian sejenis yang dilakukan di SMK Negeri I Karanganyar.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

- 1) Data Kualitatif, berupa gambaran SMK Negeri 1 Karanganyar
- 2) Data Kuantitatif, berupa angka, berupa dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS), dan dokumen realisasi APBS tahun 2012/2013, dokumen lainnya sebagai pendukung analisis daftar gaji pegawai dan lain-lain.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil

wawancara dan hasil observasi. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Guru, Pengawas Sekolah. Observasi dilakukan di lapangan terhadap sekolah yang dijadikan sampel/objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga peneliti tinggal menggunakannya. Data sekunder dalam penelitian ini berwujud dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS), dan dokumen realisasi APBS tahun 2012/2013, dokumen lainnya sebagai pendukung analisis seperti profil sekolah, profil pendidikan, daftar gaji pegawai dan lain-lain dokumen relevan

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar tahun pembelajaran 2012/2013 memiliki empat program keahlian dan enam kompetensi keahlian. Keempat program keahlian tersebut antara lain Bisnis Manajemen, Tata Busana, Teknologi Informasi dan Usaha Perjalanan Wisata. Program keahlian Bisnis Manajemen terdiri dari tiga Kompetensi keahlian, antara lain: Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Pemasaran. Tata busana terdiri dari satu kompetensi keahlian yaitu Busana Butik, Program Keahlian teknologi Informasi terdiri dari satu kompetensi keahlian yaitu Multimedia dan Program Keahlian Usaha Perjalanan Wisata terdiri dari satu Kompetensi Keahlian yaitu Usaha Perjalanan Wisata.

SMK Negeri 1 Karanganyar merupakan sekolah negeri sehingga Pembiayaan yang terjadi di SMK Negeri 1 Karanganyar bersumber dari beberapa pihak, antara lain: bantuan Pemerintah dan bantuan masyarakat. Pemerintah. Bantuan pemerintah terdiri dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 381.080.000,00, bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp 575.000.000,00, dan pemerintah kabupaten sebesar Rp 3.722.166.070,00. Sehingga jumlah bantuan dari pemerintah sebesar Rp 4.678.246.070,00. Bantuan masyarakat terdiri dari sumbangan sukarela operasional sekolah sebesar Rp 1.975.974.000,00, sumbangan sukarela pengembangan institusi sebesar Rp 1.601.200.000,00, bantuan praktik sebesar Rp 362.688.000,00, dan bantuan OSIS sebesar Rp 52.308.000,00. Jumlah bantuan masyarakat sebesar Rp 3.992.170.000,00. Sehingga total pendapatan yang diterima SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pembelajaran 2012/2013 sebesar Rp 8.670.416.070,00.

Biaya pendidikan yang terjadi secara faktual di SMK Negeri 1 Karanganyar terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya

pendidikan sebesar Rp 9.929.714.726,80, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 1.259.298.656,80. Defisit ini terjadi dikarenakan adanya biaya penyusutan yang belum diperhitungkan dalam mata belanja SMK Negeri 1 Karanganyar.

Komponen pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 1 Karanganyar dianalisis berdasarkan PP No. 19 tahun 2005. Hasil analisis klasifikasi biaya menunjukkan komponen pembiayaan terdiri dari: biaya tenaga pendidik sebesar Rp 4.586.790.070,48, biaya tenaga kependidikan sebesar Rp 504.241.499,52, biaya alat dan bahan habis pakai sebesar Rp 345.621.000,00, biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sebesar Rp 284.318.500,00, biaya daya dan jasa sebesar Rp 178.800.000,00, biaya transportasi sebesar Rp 88.010.000,00, biaya konsumsi sebesar Rp 94.549.000,00, biaya pembinaan siswa sebesar Rp 379.239.500,00, biaya pelaporan sebesar Rp 42.230.500,00, biaya pengadaan sarana dan prasarana non lahan sebesar Rp 1.874.710.000,00 dan biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 291.906.000,00. Biaya penyusutan tidak diatur dalam PP No. 19 tahun 2005. Biaya penyusutan dihitung berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 menghasilkan biaya sebesar Rp 1.259.298.656,80 selama tahun pembelajaran 2012/2013.

Hasil analisis *cost volume profit* menunjukkan total biaya variabel sebesar Rp 757.086.733,88, total biaya tetap sebesar Rp 8.779.720.901,05, total biaya operasional siswa Rp 9.929.714.726,80. sehingga diperoleh biaya operasional per siswa per tahun (*unit cost*) sebesar Rp 6.852.804,19. dan biaya operasional per siswa per bulan sebesar Rp 571.067,10.

Break event point terdiri dari dua jenis *break event point*, yaitu *break event point* dalam rupiah dan *break event point* dalam satuan kuantitas. Perhitungan *break event point* dalam rupiah sebesar Rp 522.489,12. SMK Negeri 1 Karanganyar akan mengalami kondisi impas pada biaya pendidikan sebesar Rp 522.489,12 per bulan per siswa. Perhitungan *break event point* dalam satuan sebesar 1.608 siswa. SMK Negeri 1 Karanganyar akan mengalami kondisi impas pada kondisi jumlah siswa 1.608 siswa.

KESIMPULAN

Perhitungan *break event point* atas kondisi faktual di SMK Negeri I Karanganyar tahun pembelajaran 2012/2013 memperoleh hasil: 1) *break event point* dalam rupiah sebesar Rp 522.489,12; 2) *break event point* dalam satuan sejumlah 1.608 satuan (siswa)

Perhitungan biaya pendidikan dengan pendekatan tradisional di SMK Negeri I Karanganyar tahun pembelajaran 2012/2013 memperoleh hasil: 1) total biaya pendidikan per tahun sebesar Rp 9.929.714.726,80; 2) biaya

pendidikan per siswa per tahun sebesar Rp 6.852.804,19; dan 3) biaya pendidikan per siswa per bulan sebesar Rp 571.067,10.

Kondisi faktual dari perhitungan biaya pendidikan yang dilakukan di SMK Negeri I Karanganyar menunjukkan pola dengan pendekatan tradisional. Biaya pendidikan yang dipungut kepada setiap siswa ternyata masih sangat rendah dibandingkan dengan biaya yang seharusnya dibebankan kepada siswa. Faktor bantuan pemerintah masih dominan dalam pembiayaan pendidikan di SMK Negeri I Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2003. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Biaya Operasi Satuan Pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Anonim. 2003. Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Anonim. 2009. Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia. Pemerintah Republik Indonesia.
- Anonim. 2010. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Atkinson, A.A., R.S. Kaplan, E.M. Matsumura, dan S.M. Young. 2007. *Management Accounting fifth Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall Inc.
- Azmi dkk., 2012, *Penerapan Cost Volume Profit Analysis Sebagai Alat Perencanaan Laba dan Pengambilan Keputusan Penjualan*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Basu, O.N, & Conrad, E.J.1994, *Cost Volume Provit Analysis: Uses and Complexities in a Bank*, *The Journal of Bank Cost & Management Accounting*, 7(2) 58 Retrieved Form.
- <http://search.proquest.com/docview/2/4033062?accountid:44945>.
- Chambers, J.G., J. Levin, dan D. DeLancey. 2006. *Efficiency and Adequacy in California School Finance: A Professional Judgment Approach. Working Paper*, American Institutes for Research (AIR) California.
- Fattah, Nanang 2001. "Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar" <http://google.com/htm>, download tanggal 8 September 2006.
- Fattah, Nanang. 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.

- Ghozali, Abbas. 2004. *Analisis Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Hallak, J, *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan* (Paris: International Institute For Planning, UNESCO, 1985).
- Horngren, Datar dan Foster. 2006, *Akuntansi Biaya* jilid 1 edisi 12, Jakarta: Erlangga.
- Matz, Adolph dan Ursy, Milton F, 1990, *Akuntansi Biaya Perencanaan dan pengendalian Jilid 1. Edisi ke 8*, Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. 1990, *Akuntansi Biaya*. Edisi ke 4. Yogyakarta: BPF.
- Supriyadi, Dedi, 2003, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Rosda Karya.
- Supriyono, R.A. 2000, *Akuntansi Manajemen*. cetakan ke empat. Yogyakarta: BPF.
- Ursy, Carter. 2005, *Akuntansi Biaya*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.